



LAPORAN KINERJA 2024

DINAS PERIKANAN
DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BATU
BARA



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang maha esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara, Serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturab Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaopran Kinerja dan Riview atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekak yang kuat untuk menginformasikan capain kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024.

Secara keseluruhan penyenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Perikanan dan Peternakan KAbupaten Batu Bara telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indicator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien.

Akhirnya kami sampaokan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabuapten Batu Bara Tahun 2024.



Perupuk, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Batu Bara

Antoni Ritonga, SP

Nip. 19690529 199303 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Maksud dan Tujuan	8
1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara	9
1.4 Isu – Isu Strategis Pengembangan Sektor Perikanan dan Peternakan	28
1.5 Sistematika Penyusunan	32
PERENCANAAN KINERJA	34
2.1 Perencanaan Strategis	34
2.2 Perjanjian Kinerja	36
AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	43
3.2 Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara.	66
PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan.....	71



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024.....	5
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024.....	27
Tabel 3. Jumlah ASN berdasarkan Jabatan.....	27
Tabel 4. Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara.....	28
Tabel 5. Tujuan dan sasaran RPD 2024-2026.....	35
Tabel 6. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	36
Tabel 7. Target Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023.....	37
Tabel 8. Formula Pengukuran Kinerja dan Teknik Pengumpulan Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023.....	40
Tabel 9. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	42
Tabel 10. Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024.....	44
Tabel 11. Capaian Indikator Kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB.....	42
Tabel 12. Efisiensi Anggaran terhadap indikator Kinerja Kontribusi sub sektor Perikanan dalam PDRB.....	45
Tabel 13. Capaian Indikator Kontribusi Sub Sektor Peternakan dalam PDRB.....	45
Tabel 14. Efisiensi Anggaran terhadap indikator Kinerja Kontribusi sub sektor Peternakan dalam PDRB.....	45
Tabel 15. Capaian Produksi Perikanan Tangkap tahun 2024.....	46
Tabel 16. Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.....	47
Tabel 17. Data Produksi Ikan berdasarkan pengelompokn jenis / komoditas.....	49
Tabel 18. Efisiensi Anggaran terhadap Indikator Kinerja Produksi Perikanan tangkap.....	49
Tabel 19. Capaian Indikator Volume Produksi Perikanan Budidaya.....	50
Tabel 20. Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.....	50
Tabel 21. Daftar Penerima Paket Bantuan program pengelolaan perikanan Budidaya.....	52
Tabel 22. Efisiensi anggaran terhadap indikator kinerja produksi perikanan budidaya.....	54
Tabel 23 Capaian Indikator Produksi Pengolahan Hasil Perikanan.....	55



Tabel 24. Capaian Indikator Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.....	56
Tabel 25. Efisiensi anggaran terhadap indikator kinerja produksi hasil pengolahan Ikan	58
Tabel 26. Capaian Indikator Peningkatan Produksi Ternak Unggulan.....	58
Tabel 27. Capaian Realisasi Indikator Peningkatan Produksi Ternak Unggulan.....	58
Tabel 28. Populasi Ternak Kabupaten Batu Bara tahun 2024.....	60
Tabel 29. Daftar kegiatan dan volume sekolah lapang.....	62
Tabel 30. Efisiensi anggaran terhadap indikator kinerja Produksi hasil peternakan unggulan.....	64
Tabel 31. Capaian Indikator Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Peternakan.....	64
Tabel 32. Efisiensi anggaran terhadap indikator kinerja nilai AKIP.....	66
Tabel 33. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun Anggaran 2024.....	66
Tabel 34. Perbandingan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	70



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara Periode Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Analisis dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja ini digunakan untuk membuktikan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kepala Dinas yang telah dicanangkan pada tahun 2024. Berikut adalah rincian dari 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicapai.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Peternakan Dalam PDRB	Kontribusi sub sektor Perikanan dalam PDRB	Nilai	2,20	-	-
		Kontribusi sub sektor Peternakan dalam PDRB	Nilai	1,05	-	-
2	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	60.767	51.870,10	85,36
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3.100	3.120,41	100,65
		Produksi Hasil Pengolahan Ikan	Ton	1.600	1.797,56	112,35
3	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan Unggulan	Produksi daging sapi	Ton	310	271,91	87,71
		Produksi daging kambing	Ton	30	27,34	91,13
		Produksi daging domba	Ton	58	53,44	92,14
		Produksi telur	Ton	610	489,29	80,21
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	74,00 (BB)	75,1 (BB)	101,49



Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 10 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 5 (lima) diantaranya telah mencapai target dengan predikat **sangat tinggi**, 3 (tiga) Indikator predikat Tinggi dan 2 (dua) indikator belum bisa di ukur dikarenakan nilai pdrd belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batu Bara. Artinya dapat dinyatakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 pada tingkat kategori **Sangat Tinggi** walaupun ada 2 (dua) indikator belum dapat dihitung.

Sebagai langkah nyata dari perbaikan berkelanjutan tersebut, pada tahun 2025 Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara akan merencanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Peternakan dengan mempertajam program/kegiatan dan menganalisis permasalahan dan peluang disetiap indikator dengan memperhatikan kondisi perkembangan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Batu Bara demi untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku utama sektor perikanan dan peternakan guna mencapai tujuan utama yaitu peningkatan ekonomi Masyarakat Kabupaten Batu Bara.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Upaya untuk melakukan reformasi di segala bidang dalam rangka pembaharuan manajemen pemerintahan didasarkan kepada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Undang– Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kedua perangkat hukum ini, menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh–sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip–prinsip pemerintahan yang baik.

Selaras dengan tekad tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dengan dilatar belakangi aturan hukum tersebut, maka mewajibkan Instansi Pemerintah agar membuat Laporan Akuntabilitas.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong



terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada public.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2024, maka LKjIP Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2024 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan kepada Bupati Batu Bara.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ini adalah sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan yang dilakukan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam hal ini pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2024.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ini ditujukan:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perikanan dan Peternakan untuk meningkatkan kinerjanya;
- c. Peningkatan Akuntabilitas Dinas Perikanan dan Peternakan Batu Bara;
- d. Umpan Balik bagi Peningkatan Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara;



- e. Meningkatkan Kredibilitas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara terhadap Pemberi Amanah/Delegasi Wewenang;
- f. Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam Melaksanakan Tugas sehingga akan Lebih Efektif dan Responsif terhadap lingkungan organisasinya.

1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara

a. Kedudukan

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara dan Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara dan kemudian melalui Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara.

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 61 tahun 2022 tentang Tugas dan Pokok Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara menjabarkan bahwa Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perikanan dan peternakan. Dinas Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;



- c. Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- d. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan;
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perikanan dan peternakan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang perikanan dan peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan dan peternakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan dan peternakan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang perikanan dan peternakan;
- e. pembinaan terhadap uptd dan kelompok jabatan fungsional dinas perikanan dan peternakan;
- f. pemberian petunjuk dan arahan kepada sekretaris, kepala bidang dan unit pelaksana teknis agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan kegiatan koordinasi dengan sekretaris, kepala bidang dan unit pelaksana teknis secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- h. pembinaan dan pelaksanaan kerja sama dalam bidang perikanan dan peternakan dengan instansi pemerintah serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah;
- i. menyelenggarakan pembinaan kepada bawahan dan menilai hasil kerja bawahan di lingkungan dinas perikanan dan peternakan



berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/ wakil bupati dan sekretaris daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
- c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada dinas perikanan dan peternakan serta uptd;
- d. pengkoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
- e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi standar operasional prosedur (sop);
- g. memberi petunjuk dan bimbingan kepada para subbagian agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku serta mengkoordinasikan para kepala sub bagian di lingkungan sekretariat baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- h. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan sekretariat dinas perikanan dan peternakan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;



- i. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sekretariat sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan sumberdaya manusia. Rincian tugas sebagaimana dimaksud ini adalah :

- a. pelaksanaan urusan administrasi umum;
- b. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana;
- d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumberdaya manusia;
- e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- f. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
- g. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja dinas perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- h. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- i. pelaporan pelaksanaan subbagian umum dan kepegawaian sebagai pertanggung jawaban dan penilaian atasan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris.

**b. Tim Substansi Program dan Kelompok Jabatan Fungsional**

Subkoordinator Program dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan administrasi rencana program, kegiatan, anggaran, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. penyusunan administrasi rencana program, kegiatan, anggaran, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program, kegiatan, anggaran, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- d. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- e. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan subkoordinator program dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris.

c. Tim Substansi Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan anggaran, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud ini adalah sebagai berikut :

- a. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- b. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
- c. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;



- e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- f. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan subkoordinator keuangan dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris.

3. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan

Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan perikanan tangkap dan pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengendalian tugas administratif dan teknis operasional bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan data sumber daya pesisir, perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya perikanan;
- d. pelaksanaan perencanaan pemanfaatan dan pengembangan usaha perikanan tangkap;
- e. pelaksanaan pengembangan, pembangunan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- f. pelaksanaan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan bidang perikanan tangkap;
- g. pembinaan dan pemberdayaan nelayan kecil;
- h. pelaksanaan sosialisasi hukum dan peraturan perikanan, koordinasi pengawasan dan kerjasama antar wilayah;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perikanan tangkap dan sumber daya perikanan;



- j. pelaksanaan penyusunan rencana pelestarian dan rehabilitasi kawasan pesisir, penanganan bencana pesisir, pencemaran, perubahan iklim, dan serta koordinasi perlindungan sumber daya perikanan;
- k. pelaksanaan perumusan kebijakan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- l. pelaksanaan rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap;
- m. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- n. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas.

a. Tim Substansi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi program kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya perikanan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja seksi pemanfaatan sumber daya perikanan;
- b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi statistik perikanan tangkap;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis standarisasi sarana dan prasarana penangkapan ikan dan penanganan ikan di atas kapal;
- d. pelaksanaan rehabilitasi, pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- e. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil;
- f. pelaksanaan verifikasi teknis kelayakan usaha penangkapan ikan;
- g. pelaksanaan penumbuhan dan penguatan kelembagaan nelayan kecil;



- h. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan fasilitasi permodalan dan investasi perikanan tangkap;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan jaminan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan tangkap;
- k. pelaksanaan rekomendasi ketelusuran hasil perikanan tangkap;
- l. pelaksanaan rekomendasi penyaluran dan pemanfaatan bbm untuk nelayan;
- m. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- n. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan subkoordinator pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan.

b. Tim Substansi Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi program kegiatan di bidang pengendalian sumber daya perikanan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja seksi pengendalian sumber daya perikanan;
- b. pelaksanaan identifikasi pemanfaatan sumber daya perikanan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan sumber daya perikanan secara terpadu;
- d. pelaksanaan pembinaan mitigasi bencana pesisir, pencemaran, perubahan iklim dan pelestarian lingkungan perairan;



- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi rehabilitasi kerusakan sumber daya perikanan;
- f. pelaksanaan pemulihan stok sumber daya ikan di perairan;
- g. pelaksanaan pembinaan tentang hukum dan peraturan perikanan;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan alat maupun bahan-bahan yang merusak dan berbahaya pada kegiatan pembudidayaan dan penangkapan ikan di perairan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelengkapan izin penangkapan ikan;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi usaha perikanan tangkap dan pengadaan kapal penangkap ikan;
- k. pelaksanaan fasilitasi penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan;
- l. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan;
- m. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas);
- n. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- o. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Subkoordinator Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan.

4. Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan



pengembangan usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

- a. pelaksanaan pengendalian tugas administratif dan teknis operasional bidang budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- c. pelaksanaan penyusunan profil data usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pelaksanaan perencanaan pengembangan usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan sarana prasarana di kawasan budidaya;
- f. pelaksanaan pengembangan sistem kesehatan ikan di lingkungan budidaya;
- g. pelaksanaan pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang budidaya;
- h. pelaksanaan pengembangan sistem produksi usaha budidaya perikanan;
- i. pelaksanaan pengembangan sistem perbenihan perikanan;
- j. pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi dokumen teknis perizinan usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- k. pelaksanaan identifikasi penumbuhan pembinaan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- l. pelaksanaan perumusan kebijakan pengembangan kemitraan akses permodalan dan investasi usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- m. pelaksanaan pembinaan penanganan pasca panen, diversifikasi produk olahan dan teknologi produk olahan hasil perikanan;
- n. pelaksanaan pembinaan penerapan standarisasi mutu pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- o. pelaksanaan penjaminan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan;



- p. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi serta promosi produk hasil perikanan;
- q. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- r. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan bidang budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas.

a. Tim Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja seksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. pelaksanaan identifikasi dan pendataan pelaku usaha serta kelembagaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. pelaksanaan analisis dan pengembangan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pembinaan dan bimbingan penerapan jaminan mutu serta keamanan pangan produk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis diversifikasi produk olahan hasil perikanan;
- f. pembinaan dan pengembangan produk perikanan non konsumsi;
- g. pelaksanaan pembinaan kelembagaan, peningkatan kelas kelompok dan kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil;



- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap skala usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- j. pelaksanaan fasilitasi pengembangan akses pasar dan promosi produk perikanan;
- k. pelaksanaan pengelolaan informasi harga produk perikanan;
- l. pelaksanaan penyusunan rencana distribusi produk hasil perikanan dan peningkatan konsumsi ikan daerah;
- m. pelaksanaan pembinaan sanitasi dan hygiene produk perikanan kepada pelaku usaha dan kelompok pemasar produk perikanan;
- n. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- o. penilaian prestasi kerja bawahan di Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepada bidang budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

b. Tim Substansi Budidaya Ikan Air Payau, Laut dan Air Tawar dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Budidaya Ikan Air Payau, Laut dan Air Tawar dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha budidaya ikan Air Payau, Laut dan Air Tawar. Rincian tugas sebagaimana dimaksud ini adalah :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja seksi budidaya ikan air payau, laut dan air tawar;
- b. pelaksanaan identifikasi dan pendataan pelaku usaha budidaya ikan air payau, laut dan air tawar;
- c. pelaksanaan bimbingan penggunaan sarana budidaya ikan air payau, laut dan air tawar, dan bimbingan pembuatan pakan dengan menerapkan standar budidaya yang baik dan benar;



- d. pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan pangan dibidang budidaya ikan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan komoditas ikan unggulan, serta inovasi dan adaptasi teknologi budidaya ikan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian peredaran induk dan benih ikan sesuai standar nasional indonesia;
- g. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis perbenihan ikan, pembinaan, monitoring pada usaha budidaya ikan;
- h. pelaksanaan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan untuk kegiatan usaha budidaya ikan;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perbenihan dan kesehatan ikan, dan identifikasi kebutuhan sarana produksi usaha budidaya ikan;
- j. pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi dokumen teknis perizinan usaha budidaya ikan;
- k. pelaksanaan identifikasi, penumbuhan, pembinaaan, dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha budidaya ikan;
- l. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- m. penilaian prestasi kerja bawahan di Subkoordinator Budidaya Ikan Air Payau, Laut dan Air Tawar dan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai



berikut:

- a. penyusunan kebijakan perbibitan dan produksi, keswan dan kesmavet serta bina usaha dan pemasaran;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak, keswan dan pemasaran;
- e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam usaha peternakan, investasi dan pemasaran;
- h. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- i. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- m. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Tim Substansi Perbibitan dan Produksi Ternak dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Perbibitan dan Produksi Ternak dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis



serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi perbibitan dan produksi ternak;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, perbibitan ternak, dan hijauan pakan ternak;
- d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (hpt);
- e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit hpt;
- f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit hpt;
- g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbibitan dan produksi ternak;
- k. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- l. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Subkoordinator Perbibitan dan Produksi Ternak dan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Tim Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat



Veteriner dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Rincian tugas sebagaimana dimaksud ini adalah:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- i. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- j. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- k. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- l. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- m. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;



- o. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- p. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- q. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan subkoordinator kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

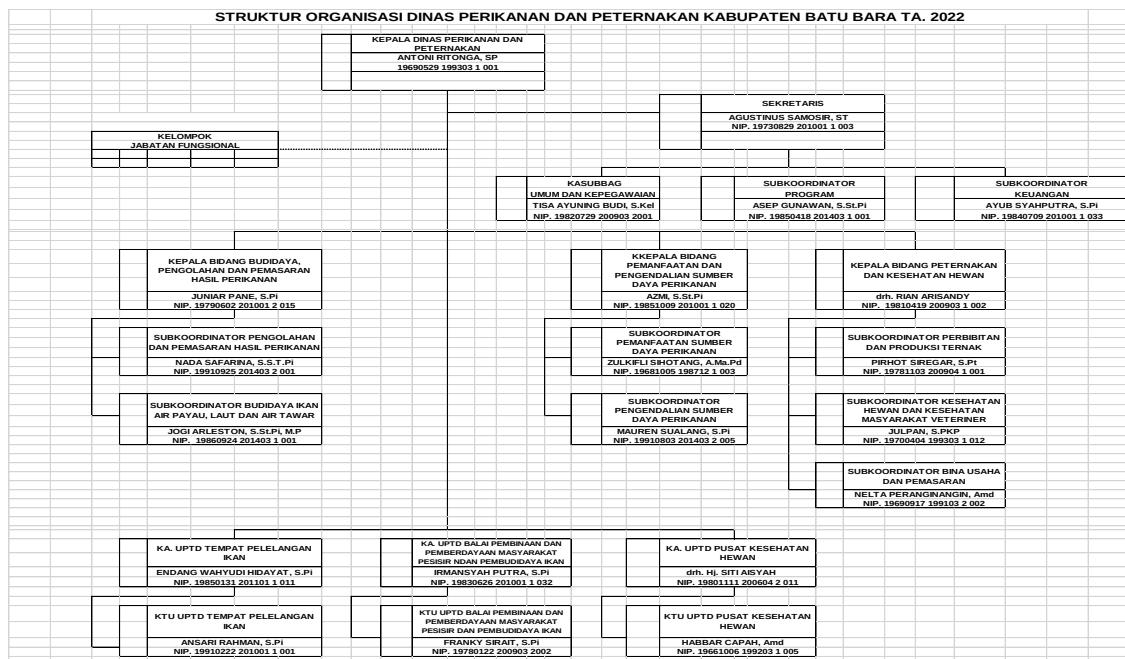
c. Tim Substansi Bina Usaha dan Pemasaran dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Bina Usaha dan Pemasaran dan Kelompok Jabatan Fungsional melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di seksi bina usaha dan pemasaran hasil peternakan. Rincian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi bina usaha dan pemasaran hasil peternakan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembinaan usaha dan pemasaran hasil peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil bina usaha dan pemasaran hasil peternakan;
- d. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil bina usaha dan pemasaran hasil peternakan;
- e. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- f. memfasilitasi promosi dan kerjasama / kemitraan hasil produk, usaha peternakan dan pemasaran;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha dan pemasaran hasil peternakan;



- h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi bina usaha dan pemasaran hasil peternakan;
- i. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- j. penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan subkoordinator bina usaha dan pemasaran dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.



Gambar 1. Bagan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan

c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Peternakan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara terdiri sumber daya manusia dan aset sarana dan prasarana , uraian dari masing-masing sumberdaya adalah sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya manusia



Sumber daya Dinas Perikanan dan Peternakan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara terdiri dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yaitu:

Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Pendidikan	2023	%
1	Pasca Sarjana	6 Orang	10
2	Sarjana	42 Orang	70
3	Diploma III	6 Orang	10
4	Diploma II	1 Orang	1,6
5	SLTA	5 Orang	8,3
	Jumlah	60 Orang	100%

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Batu Bara tahun 2024

Tabel 3. Jumlah ASN berdasarkan Jabatan

No	Pendidikan	Uraian
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekertaris	1 Orang
3	Kepala Bidang	3 Orang
4	Kasi/Kasubag/Katua Substansi Tim	10 Orang
5	Kepala UPTD	3 Orang
6	Kepala TU UPTD	3 Orang
5	Staf	39 Orang
	Jumlah	60 Orang

2.2.2 Aset Sarana Prasarana

Uraian Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Sebagai Berikut :



Tabel 4. Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara

No.	Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan dan Peternakan	Jumlah
1	Gedung Kantor ($\pm 771,75 \text{ m}^2$)	1 Unit
2	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4 Unit
3	Balai Pelatihan Sekaya Maritim	1 Unit
4	Kendaraan Roda Empat	7 Unit
5	Kendaraan Roda 6	1 Unit
6	Kendaraan Roda Dua	18 Unit
7	Kapal Motor	1 Unit
8	Pasar Hewan	1 Unit
9	Pusat Kesehatan Hewan	1 Unit
10	Pusat Kesehatan Hewan Pembantu	2 Unit
11	Pos Pelayanan Insentif Buatan (IB)	2 Unit

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Batu Bara

1.4 Isu – Isu Strategis Pengembangan Sektor Perikanan dan Peternakan Kab. Batu Bara

1. Produksi Hasil Budidaya Masih Rendah

Kabupaten Batu Bara memiliki Panjang garis patai sebesar 62 km, tentunya itu merupakan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan baik untuk usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan. Salah satu potensi perikanan yang potensial untuk dikembangkan adalah perikanan budidaya dikarenakan perikanan budidaya dapat direkayasa dengan penggunaan atau penerapan teknologi budidaya hasil dari riset atau penelitian yang terus berkembang.

Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Batu Bara cukup besar yaitu seluas 5.277 Ha yang terdiri dari Potensi Budidaya Air Payau 4.030 Ha dan Air Tawar sebesar 1.247 Ha dengan kooditas unggulan seperti Udang, Ikan Kerapu, Ikan Lele, Ikan Gurane, Ikan Nila, Mas, Patin, Nila



Salin, Bandeng, akan tetapi baru 55 % dari potensi tersebut yang dimanfaatkan untuk lokasi usaha budidaya perikanan. Sehingga mengakibatkan produksi perikanan budidaya masih rendah. Faktor lain yang menyebabkan produksi perikanan masih rendah anatara lain :

- a. Kurangnya Stok Benih dan Induk Unggul di Kabupaten Batu Bara sehingga pasokan benih dan induk ikan masih dari luar daerah ;
- b. Alih fungsi lahan budidaya khususnya lahan budidaya udang (tambak)
- c. Belum berkembangnya teknologi pembuatan pakan ikan mandiri
- d. Masih rendahnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk lokasi usaha budidaya ikan
- e. Masih rendahnya pengetahuan pembudidaya ikan akan teknologi budidaya ikan dan pasar serta akses permodalan

2. Belum optimalnya Produksi Perikanan Tangkap

Sebagai Kabupaten yang memiliki Panjang garis pantai sepanjang 62 km, Kabupaten Batu Bara tentunya memiliki potensi yang cukup besar khususnya dalam bidang perikanan tangkap, akan tetapi dalam 5 (lima) tahun terakhir, potensi yang besar tersebut belum dikelola secara optimal, hal ini bisa dilihat dari sumbangsih PDRB sub sektor perikanan terhadap PDRB hanya sebesar 3,37 % pada tahun terakhir periode renstra. Selain faktor harga jual dan faktor lainnya, produksi perikanan tangkap akan mempengaruhi terhadap pendapatan dan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Batu Bara.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya produksi perikanan tangkap antara lain :

- a. Efek dari penggunaan alat tangkap terlarang yang merusak ekosistem laut seperti matinya terumbu karang ;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap seperti Pabrik Es, Cold Storage, Pelabuhan Perikanan, SPBUN dll ;
- c. Kerusakan ekosistem hutan mangrove yang mana hutan mangrove sebagai tempat berkembang biak hewan-hewan laut
- d. Masih rendahnya penggunaan aplikasi teknologi penangkapan ikan



- e. Belum adanya industri pengolahan hasil perikanan
- f. Pertumbuhan kapal tidak dibarengi dengan perizinan yang lengkap

3. Masih Rendahnya Nilai Daya Saing Produk

Daya saing produk dapat diartikan kemampuan suatu produk atau komoditi masuk ke dalam pasar luar negeri atau dalam negeri dan kemampuan untuk bertahan dalam pasar tersebut. Di Kabupaten Batu Bara kegiatan pengolahan hasil perikanan masih sebatas industri rumahan yang masih menggunakan teknologi sederhana tanpa ada proses packing yang sederhana serta pemasaran hanya melalui agen-agen yang datang sehingga kurang memiliki daya saing dan sulit untuk masuk ke pasar yang lebih luas. Faktor yang dapat meningkatkan atau yang memiliki daya ungkit tinggi untuk meningkatkan daya saing produk perikanan adalah berkembangnya industri pengolahan.

Produk unggulan hasil pengolahan ikan di Kabupaten Batu Bara antara lain : Ikan Teri, Pindang Ikan Kembung / Kembung Rebus, Ikan Asin, Kepah Asin, Udang Kering, Terasi / Belacan, Kerupuk Ikan dll. Di Kabupaten Batu Bara terdapat juga Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang bekerja sama dengan Perusahaan-perusahaan pengolah ikan yang tujuan pasarnya adalah ekspor dengan komoditas utama adalah daging kepiting dan cumi/sotong.

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum berkembangnya industri pengolahan hasil di Kabupaten Batu Bara antara lain :

- a. Belum adanya peta pengolahan hasil di Kabupaten Batu Bara yang memuat potensi serta produk-produk unggulan kabupaten
- b. Teknologi pengolahan masih sederhana
- c. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku utama pengolahan hasil perikanan akan peningkatan daya saing produknya
- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang memadai

3.1.2 Permasalahan Bidang Peternakan

1. Belum optimalnya pemasaran hasil produksi peternakan



Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial dari sejumlah aktivitas yang berkesinambungan yang dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan rancangan produk, harga, promosi dan distribusi dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran sesuatu yang bernilai pada kelompok sasaran.

Pemasaran hasil produksi peternakan dan perkebunan berarti kegiatan bisnis dimana produk yang dipasarkan adalah berupa komoditi peternakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, dengan harapan konsumen akan puas dengan mengkonsumsi komoditas tersebut. Komoditas tersebut memiliki sifat mudah rusak (perishable) dan jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif sedikit (bulky). Sifat tersebut akan mempengaruhi mekanisme pasar dalam pemasaran. Oleh karena itu, sering sekali terjadi harga produksi peternakan yang dipasarkan menjadi naik-turun (berfluktuasi) secara tajam sehingga sering menimbulkan kerugian di pihak peternak atau produsen. Karena kejadian semacam ini maka petani atau produsen memerlukan kekuatan untuk melaksanakan pemasaran ini.

Permasalahan lain yang menyebabkan belum optimalnya pemasaran hasil produksi pertanian antara lain : lemahnya infrastruktur, lemahnya informasi pasar, skala pasar pertanian yang relatif kecil, kurangnya pengetahuan, misalnya grading dan standarisasi, tingginya biaya transaksi, lemahnya produsen (peternak) dalam memanfaatkan peluang pasar, produsen (peternak dan pekebun) melakukan usaha tidak berdasarkan pada permintaan pasar, melainkan karena usahatani yang diusahakan secara turun temurun.

2. Adanya ancaman penyakit yang strategis baik yang sporadi maupun exotis baik pada ternak besar, ternak kecil maupun unggas

Lalu lintas ternak antar kabupaten maupun antar propinsi memungkinkan adanya mutasi penyakit. Oleh karenanya, diperlukan adanya pengawasan lalulintas ternak oleh petugas kesehatan hewan terutama di perbatasan daerah.



3. Perlunya optimalisasi kesehatan masyarakat veteriner

Dalam rangka optimalisasi kesehatan masyarakat veteriner, diperlukan adanya pembangunan Rumah Potong Hewan sehingga konsumen akan mendapatkan produk bahan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Adapun yang menjadi peluang dalam pengembangan perikanan dan peternakan di Kabupaten Batu Bara antara lain :

1. Masih adanya potensi pengembangan perikanan terutama potensi perikanan budidaya air payau, air tawar dan air laut
2. Permintaan Komoditas Perikanan terus meningkat baik domestic maupun Eksport Komoditas perikanan
3. Lokasi kabupaten sebagai lokasi proyek strategis nasional akan berpengaruh terhadap permintaan pasar produk perikanan
4. Perikanan Budidaya masih bisa dikembangkan dengan memanfaatkan Lahan-lahan yang terbengkalai dan lahan pekarangan
5. Komoditas perikanan dapat diolah menjadi beberapa produkturnannya sehingga dapat meningkatkan nilai jual.
6. Sektor Industri Pengolahan bisa dikembangkan
7. Kebijakan Pemerintah Pusat, Provisi dan Daerah yang mendukung tentang pengembangan sector kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat pedesaan.
8. Potensi sumber daya alam masih besar
9. Permintaan pasar akan hewan ternak cukup tinggi
10. Dapat diusahakan baik sebagai usaha utama maupun sampingan
11. Sumber Daya Manusia / petugas kesehatan hewan cukup memadai

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :



BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan dan disajikan penjelasan umum organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja/penetapan kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan kabupaten Batu Bara untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis sesuai dengan hasil Pengukuran Kinerja. Untuk setiap Pernyataan Kinerja Sasaran Strategis tersebut dilakukan Analisis Capaian Kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

Menguraikan Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran :

- **Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi agar pendekatan perencanaan strategis ini jelas dan sinergis, selaras dengan visi, misi, potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Oleh sebab itu, perlu analisis dalam menentukan sasaran strategis pembangunan sector kelautan dan perikanan dan harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batu Bara tahun 2024 – 2026. Dari hasil analisis tersebut dapat ditetapkan indikator-indikator utama dalam pembangunan perikanan dan indikator-indikator sasaran tersebut harus dicapai dengan kerja sama antar sektor sehingga tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara dapat tercapai.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dibutuhkan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan potensi perikanan dapat dioptimalkan dan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. Program-program pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan dalam mendukung visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Batu Bara tahun 2005-2025 maka Dinas Perikanan dan Peternakan menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang bersinergi mendukung visi misi kepala daerah.

Berdasarkan telaah arah pembangunan kabupaten Batu Bara sebagai mana tertuang dalam RPD kabupaten Batu Bara 2024-2026 maka ditetapkan tujuan pembangunan Dinas Perikanan dan Peternakan, kemudian berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, dituangkan menjadi sasaran strategis Dinas Perikanan dan Peternakan. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan dan Peternakan kabupaten Batu Bara sebagai berikut :



Tabel 5. Tujuan dan sasaran RPD 2024-2026

Misis RPJP	Tujuan RPJP	Sasaran
Misi No.3 Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing serta meningkatkan rasa aman masyarakat	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan telaah visi, misi, tujuan dan sasaran RPJP kabupaten Batu Bara 2005-2024 tersebut, maka Dinas Perikanan dan Peternakan pada tahun 2024 atau periode awal Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 2026 telah menetapkan program dan kegiatan guna mendukung arah pembangunan Kabupaten Batu Bara sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang dituangkan kedalam Rencana Kerja yang didalamnya mencakup Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan. IKU merupakan komponen penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). IKU memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

1. Sebagai acuan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan
2. Sebagai acuan dalam menyampaikan rencana kerja dan anggaran
3. Sebagai acuan dalam menyusun dokumen penetapan kinerja
4. Sebagai acuan dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja
5. Sebagai acuan dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja

Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 6. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan Sasaran Jangka Pendek Pelayanan Perangkat Daerah									
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL RPJMD (2022)	TARGET /CAPAIAN KINERJA TUJUAN / SASARAN			KONDISI AKHIR (2026)	STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
					2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan Perekonomian Sub Sektor Perikanan dan Peternakan	Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan dan Peternakan berbasis optimalisasi sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat	Kontribusi sub sektor perikanan dalam PDRB	3,03	3,2	3,25	3,3	3,3	Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Serta Peternakan yang berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat / pelaku usaha
			Kontribusi sub sektor peternakan dalam PDRB	0,76	1,05	1,05	1,10	1,10	
		Terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	Produksi Perikanan Tangkap	45.242,99	60.767	6.100	62.300	62.300	
			Produksi Perikanan Budidaya	2.241,02	3.100	3.900	5.000	5.000	
			Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	1.239	1.600	1.900	2.300	2.300	
		Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	Daging Sapi	282,16	310	320	330	330	
			Daging Kambing	27,61	30	33	35	35	
			Daging Domba	54,45	58	63	68	68	
			Telur	370,53	610	620	630	630	
2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	BB (74,12)	BB (74,00)	BB (75,00)	A (75,50)	BB (76,00)	Pengembangan SDM Aparatur

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja, adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024- 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Target Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan dan peternakan dalam PDRB	1. Kontribusi sub sektor perikanan dalam PDRB	%	3,20
		2. Kontribusi sub sektor peternakan dalam PDRB	%	1,05
2.	Terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	produksi perikanan tangkap	Ton	60.767
		produksi perikanan budidaya	Ton	3.100
		produksi pengolahan hasil perikanan	Ton	1.600
3.	Meningkatnya produksi hasil peternakan unggulan	Produksi Daging Sapi	Ton	310
		Produksi Daging Kambing	Ton	30
		Produksi Daging Domba	Ton	58
		Produksi Telur	Ton	610
4.	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (74,00)

Adapaun program-program untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Batu Bara adalah sebagai berikut :



No	Program	Pagu (Rp)	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.531.128.388	
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.248.632.000	
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.422.649.620	
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.048.000.000	
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.500.000.000	
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	495.000.000	
9	Program Penyuluhan Pertanian	1.000.000.000	
	Total	20.245.410.008	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel 3.1 berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.



Tabel 8. Formula Pengukuran Kinerja dan Teknik Pengumpulan Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FORMULA		TEKNIK PENGUMPULAN DATA	TEKNIK MONITORING DAN	
1	Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan dan peternakan	Persentase Kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Peternakan dalam PDRB	Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan dan Peternakan berbasis optimalisasi sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat	1.1	Kontribusi sub sektor perikanan dalam PDRB	3,2	PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun n -	X 100%	Data Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan serta Daftar Rata-Rata Harga Komoditas Perikanan	Koordinasi dan Konsultasi dengan BPS Kabupaten Batu Bara
					PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun n-1					
				1.2	Kontribusi sub sektor Peternakan dalam PDRB	1	PDRB Sub Sektor Perikanan	X 100%	Data Produksi Peternakan, serta Harga Jual Komoditas Peternakan	Koordinasi dan Konsultasi dengan BPS Kabupaten Batu Bara
							PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun n-1			
2	Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	Jumlah Volume Produksi Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Produksi Pengolahan serta Pemasaran Hasil Perikanan	Terwujudnya pengeloaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	2.1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	60.767	Produksi Hasil Perikanan Tangkap Tahun n	Data Eksisting dan Perhitungan Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Recheck Data dan Perhitungan Serta Minitong Peningkatan Volume Produksi Perikanan Tangkap	
				2.2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.100	Produksi Hasil Perikanan Budidaya Tahun n	Data Eksisting dan Perhitungan Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Recheck Data dan Perhitungan Serta Minitong Peningkatan Volume Produksi Perikanan Budidaya	
				2.3	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Ton)	1.600	Produksi Hasil Olahan Produk Perikanan Budidaya Tahun n	Data Eksisting dan Perhitungan Peningkatan Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Recheck Data dan Perhitungan Serta Minitong Peningkatan Volume Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	



3.	Peningkatan Produksi Peternakan Unggulan	Jumlah Produksi Daging Sapi, Daging Kambing, Daging Domba dan Produksi Telur	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan Unggulan	3.1	Produksi Daging Sapi	310	Produksi Daging Sapi Tahun n	Data Eksisting Populasi serta Data Pemotongan Hewan	Recheck Data dan Perhitungan Serta Minitong Pemotongan Hewan pada lokasi pemotongan atau rumah potong hewan
				3.2	Produksi Daging Kambing	30	Produksi Daging Kambing Tahun n	Data Eksisting Populasi serta Data Pemotongan Hewan	Recheck Data dan Perhitungan Serta Minitong Pemotongan Hewan pada lokasi pemotongan atau
				3.3	Produksi Daging Domba	58	Produksi Daging Domba Tahun n	Data Eksisting Populasi serta Data Pemotongan Hewan	Recheck Data dan Perhitungan Serta Minitong Pemotongan Hewan pada lokasi
				3.4	Produksi Telur	610	Produksi Telur Tahun n	Data Eksisting Populasi serta Data Pemotongan Hewan	Recheck Data dan Perhitungan Serta Minitong Pemotongan Hewan pada lokasi
4.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Nilai AKIP OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	4.1	Nilai AKIP OPD	BB (74,00)	Nilai AKIP Tahun n	Nilai Akip dari Inspektorat	Evaluasi kekurangan dalam akuntabilitas kinerja OPD



Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 9. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.



3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun secara lengkap ditunjukkan oleh tabel berikut ini :



Tabel 10. Capaian Kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2023	2024			TARGET AKHIR RENSTRA 2026	CAPAIAN TAHUN S/D 2024 TERHADAP AKHIR RENSTRA 2026
				TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Peternakan Dalam PDRB	1.1 Kontribusi sub sektor perikanan dalam PDRB	3,00	3,20	0,00	0,00	3,3	0,00
		1.2 Kontribusi sub sektor Peternakan dalam PDRB	0,77	1,00	0,00	0,00	1,4	0,00
2	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	2.1 Produksi Perikanan Tangkap	59.617,25	60.767	51.870,10	85,36	60.300	86,02
		2.2 Produksi Perikanan Budidaya	2798,73	3.100	3.120,41	100,66	5.000	62,41
		2.3 Produksi Hasil Pengolahan Ikan	1409,19	1.600	1.797,56	112,35	2.300	78,15
3.	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan Unggulan	3.1 Produksi Daging Sapi	306,43	310	271,91	87,71	330	82,40
		3.2 Produksi Daging Kambing	21,02	30	27,34	91,13	35	78,11
		3.3 Produksi Daging Domba	47,41	58	53,44	92,14	68	78,59
		3.4 Produksi Telur	608,9	610	489,29	80,21	630	77,67
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	4.1 Nilai AKIP OPD	70,1	BB (74,00)	BB (75,10)	101,49	A (85,00)	88,35

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 10 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 5 (lima) diantaranya telah mencapai target dengan predikat **sangat tinggi**, 3 (tiga) Indikator predikat Tinggi dan 2 (dua) indikator belum bisa di ukur dikarenakan nilai pdrd belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batu Bara. Artinya dapat dinyatakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 pada tingkat kategori **Sangat Tinggi** walaupun ada 2 (dua) indikator belum dapat dihitung.

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja

1. Kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB

Sampai pada saat penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Nilai Kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Kontribusi Sub Sektor Peternakan dalam PDRB belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batu Bara.

Tabel 11. Capaian Indikator Kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB

Indikator	Capaian Indikator Tahun 2023	Target 2024	Realisasi	Capaian
Kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB	3,00	3,20	-	-



Tabel 12. Efisiensi Anggaran terhadap indikator Kinerja Kontribusi sub sektor Perikanan dalam PDRB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Peternakan Dalam PDRB	Kontribusi sub sektor Perikanan dalam PDRB	Nilai	2,2	-	-	9.719.281.620	9.474.020.652	97,48	-

2. Kontribusi Sub Sektor Peternakan dalam PDRB

Sampai pada saat penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Nilai Kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Kontribusi Sub Sektor Peternakan dalam PDRB belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batu Bara.

Tabel 13. Capaian Indikator Kontribusi Sub Sektor Peternakan dalam PDRB

Indikator	Capaian Indikator Tahun 2023	Target 2024	Realisasi	Capaian
Kontribusi Sub Sektor Peternakan dalam PDRB	0,77	1,05	-	-

Tabel 14. Efisiensi Anggaran terhadap indikator Kinerja Kontribusi sub sektor Peternakan dalam PDRB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Peternakan Dalam PDRB	Kontribusi sub sektor Peternakan dalam PDRB	Nilai	1,05	-	-	2.995.000.000	2.951.937.535	98,56	-

3. Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap mencakup semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya/ tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami di



laut atau perairan umum secara bebas dan bukan milik perorangan. Produksi yang dimaksud adalah semua hasil yang diperoleh, baik yang dijual atau yang dibayar sebagai upah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara, Panjang garis pantai Kabupaten Batu Bara adalah 62 km dengan 6 Kecamatan Pesisir yang berbatasan langsung dengan selat malaka serta jumlah nelayan sebanyak 20.497 orang sehingga memiliki potensi perikanan yang cukup besar khususnya perikanan tangkap.

Potensi perikanan tangkap yang cukup besar tersebut belum dapat dikelola secara maksimal. Sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap di Kabupaten Batu Bara masih belum memadai seperti Cold Storage berkapasitas besar, Pabrik Es Balok dan perlengkapan / teknologi penangkapan ikan untuk nelayan. Hal ini dapat mengakibatkan kualitas mutu hasil tangkapan rendah dan dapat menimbulkan penurunan harga apabila hasil tangkapan melimpah dan tidak dapat ditampung oleh cold storage. Pada tahun 2024 produksi perikanan tangkap di Kabupaten Batu Bara sebesar 51.870,10 Ton, bila dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 sebesar 59.617,25 Ton, artinya produksi tahun 2024 mengalami penurunan produksi sebesar 7.747,15 Ton. Adapun capaian indikator persentase peningkatan volume produksi perikanan tangkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 15. Capaian Produksi Perikanan Tangkap tahun 2024

Indikator	Produksi Tahun 2023(Ton)	Target 2024 (Ton)	Realisasi Tahun 2024 (Ton)	Capaian (%)
Produksi Perikanan Tangkap	59.617,25	60.767	51.870,10	85,36

a. Analisis Faktor Pemicu Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Capaian Indikator Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Tangkap didukung oleh pelaksanaan 2 (dua) Program yaitu :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengelolaan perikanan tangkap dengan tujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan meningkatkan produksi perikanan tangkap. Pagu



anggaran pelaksanaan program di tahun 2024 sebesar Rp. 5.248.632.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.138.537.819,- (97,90%).

Indikator kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah produksi perikanan tangkap dan target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 60.767 ton. Produksi perikanan tangkap di tahun 2024 tercatat sebesar 51.870,10 ton atau 85,36 %. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan pada program ini termasuk pada kriteria tinggi.

Tabel 16. Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN 2023	2024			TARGET AKHIR RENSTRA	Capaian 2023 terhadap Akhir Renstra 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	Produksi Perikanan Tangkap	59.617,25	60.767	51.870,10	85,36	60.300,00	86,02

Sumber : Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara

Tahun 2024

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu :

a) Pemberdayaan Nelayan Kecil

Bentuk kegiatan Pemberdayaan ini adalah pelatihan dan bimbingan teknis, pendampingan usaha perikanan tangkap serta pemberian bantuan pemerintah berupa sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas nelayan kecil sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktifitas nelayan kecil. Target dari peningkatan kapasitas nelayan yaitu jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya baik dari segi teknis maupun non teknis yaitu sebanyak 1200 nelayan dengan realisasi 1230 dengan dukungan dana sebesar Rp. 5.083.632.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.973.562.819,- (97,83%)

b) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelalangan Ikan (TPI)

Bentuk kegiatan berupa operasional pengelolaan Tempat Pelelangan ikan sebanyak 4 Unit yang terdiri dari TPI Tanjung Tiram, TPI Perupuk, TPI Lalang, TPI Medang Deras. Target dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan operasional layanan TPI berupa Tempat Pendaratan Ikan dan Tempat Jual Beli Ikan selain itu target dari Kegiatan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan ini adalah Retribusi TPI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Realisasi Retribusi Rp. 71.755.000,- (tujuh



puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau (71,75 %) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 165.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 164.975.000,- (99,98%).

Selain faktor dukungan anggaran, faktor pemicu lainnya dalam tercapainya indikator kinerja Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Tangkap antara lain :

1. Efek dari adanya kegiatan pergantian alat tangkap ramah lingkungan oleh Dinas Perikanan Batu Bara yang dilaksanakan dan dilanjutkan dengan bantuan-bantuan alat tangkap ramah lingkungan, sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap seperti banuan mesin, bantuan sampan, bantuan premi asuransi nelayan kepada nelayan-nelayan tradisional sehingga menggairahkan industry penangkapan di kabupaten batu bara baik yang bersumber dari APBD Kabupatenn Batu Bara, APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan ;
2. Permintaan pasar domestic maupun ekspor akan produk hasil tangkapan berupa Ikan Kembung, Cumi-cumi, Gurita dan kepiting rajungan mengakibatkan nelayan beralih untuk menangkap jenis ikan tersebut ;
3. Mulai bergeliatnya pasar ekspor pasca pandemic covid-19 khususnya untuk komoditas unggulan kabupaten batu bara seperti ikan Kembung, Cumi, Gurita, Rajungan, udang sehingga nelayan mulai beralih tangkapan ikan pada komoditas tersebut ;
4. Seiring beroperasinya TPI dan mulai berlakunya retribusi jasa usaha Tempat Pelalangan Ikan di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2024 Dinas Perikanan melalui petugas TPI yang tersebar di 4 (empat) lokasi melakukan pencatatan hasil tangkapan ikan di gudang-gudang atau tangkahan sehingga dapat mengurangi hasil tangkapan ikan yang tidak tercatat (*unreported*) ;

b. Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Produksi Perikanan Tangkap di Tahun 2024 belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan berbagai faktor antara lain: penurunan populasi ikan akibat eksploitasi berlebihan akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, kerusakan ekosistem laut yang mengganggu proses pemijahan, serta perubahan iklim yang memengaruhi pola migrasi ikan. Selain itu, faktor teknis seperti



keterbatasan armada tangkap yang akibat kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar solar juga berperan besar dalam kegagalan pencapaian target produksi. Data perbandingan produksi ikan Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 17. Data Produksi Ikan berdasarkan pengelompokn jenis / komoditas

No	Jenis Ikan	Produksi Ikan (Ton)	
		2023	2024
1	Ikan	29.050,60	31.807,38
2	Cumi/Gurita/Sotong	3.486,43	3.700,93
3	Udang	3.637,84	2.656,21
4	Teri	11.267,05	8.309,08
5	Ranjungan/Kepiting	1.125,72	1852,96
6	Kerang-Kerangan	3.848,32	3.543,53
	Jumlah	62.415,96	51.870.10

Sumber : Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara

Tahun 2024

c. Efisiensi Anggaran

Nilai Efisiensi pada produksi Perikanan Tangkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 18. Efisiensi Anggaran terhadap Indikator Kinerja Produksi Perikanan tangkap.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	60.767	51.870,10	85,36	5.248.632.000,00	5.138.537.819,00	97.90	0,84

Hasil perhitungan nilai efisiensi pada produksi perikanan tangkap menunjukkan nilai 0.84. pada kegiatan ini, pengelolaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik namun pelaksanaan program kinerja belum berhasil mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan di dokumen perjanjian kinerja.

4. Produksi Perikanan Budidaya

Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Batu Bara terdiri dari Perikanan Budidaya Air Payau, Air Laut dan Air Tawar. Menurut Data Statistik Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023, Potensi Perikanan Budidaya Air Payau Seluas 4.030 Ha, Budidaya Air Tawar 1.247 Ha dan Budidaya Air Laut seluas 330 Ha.



Adapaun capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 19. Capaian Indikator Volume Produksi Perikanan Budidaya

Indikator	Produksi Tahun 2023 (Ton)	Target 2023 (Ton)	Realisasi 2024 (Ton)	Capaian (%)
Produksi Perikanan Budidaya	2.798,73	3.100	3.120,41	100,66

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Capaian indikator Produksi Perikanan Budidaya telah melampaui dari target kinerja yang telah ditetapkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,66%.
- Dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, maka Produksi Perikanan Budidaya tahun 2024 mengalami pertumbuhan volume produksi yang cukup bagus sebesar 321,68 Kg dan telah melampaui target.

a. Analisis Faktor Pemicu Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Capaian Indikator Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan Tangkap didukung oleh pelaksanaan 1 (satu) Program yaitu :

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengelolaan perikanan budidaya dengan tujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan meningkatkan produksi perikanan tersebut, program ini dilaksanakan dengan pagu anggaran di tahun 2024 sebesar Rp 3.422.649.620,- dan terealisasi sebesar Rp 3.303.344.233,- (96,51%). Indikator kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah produksi perikanan budidaya dan target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 3.100 ton. Produksi perikanan budidaya di tahun 2024 tercatat sebesar 3.120,41 ton atau 100,66%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan pada program ini termasuk pada kriteria sangat tinggi.

Tabel 20. Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Budidaya



NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN 2023	2024			TARGET AKHIR RENSTRA	Capaian 2024 terhadap Akhir Renstra 2026 (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
	Produksi Perikanan Budidaya	2.798,73	3.100,00	3.120,40	100,66	5.000,00	62,41

Sumber : Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara

Tahun 2024

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) Kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil

Kegiatan ini dilaksanakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara sebagai upaya agar para pembudidaya ikan lebih berdaya dalam meningkatkan kemampuan budidaya dan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui usaha budidaya ikan yang dijalani. Selain itu, melalui kegiatan ini, Dinas Perikanan dan Peternakan juga memberikan fasilitasi secara terbuka kepada masyarakat umum yang memiliki ketertarikan untuk berusaha di bidang budidaya melalui pendampingan, pembinaan dan pelatihan serta fasilitasi sarana prasarana budidaya. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.488.698.950,0 atau sekitar 99,25%. Hasil dari kegiatan ini adalah sebanyak 30 Kelompok Pembudidaya Ikan yang dilatih berupa kegiatan pelatihan Cara Budidaya Ikan Yang Baik 8 (delapan) Angkatan, Pelatihan Cara Budidaya Ikan dalam Ember (Budidamber) sebanyak 8 (delapan) Angkatan dan Cara Pembuatan Pakan Ikan Mandiri sebanyak 4 (empat) Angkatan, serta bantuan sarana dan prasaran usaha budidaya ikan, bentuk kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 21. Daftar Penerima Paket Bantuan program pengelolaan perikanan budidaya

NO	NAMA PAKET KEGIATAN	JUMLAH PAKET	KET
1	Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik	8 Paket Kegiatan	240
2	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan melalui Budidaya Ikan dalam Ember (BUDIDAMBER)	8 Paket Kegiatan	240
3	Bantuan Sarpras Budidaya Ikan Nila Salin - Benih Ikan Nila Salin - Pakan /Pellet Ikan	- 17.800 Ekor - 1000 Kg	50
4	Bantuan Sarpras Budidaya Udang Vaname - Benur Udang Vaname - Pakan Udang	- 300.016 Ekor - 2000 Kg	60
5	Pengadaan Bantuan Benih Ikan Gurame - Benih Ikan Gurame - Pakan / Pellet Ikan	- 40.000 Ekor - 2000 Kg	80
6	Pengadaan Benih Ikan Lele - Benih Ikan Lele - Pakan / Pellet Ikan	- 250.000 Ekor - 2500 Kg	50

b) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Kecil

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan usaha budidaya ikan tawar sesuai CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dengan harapan agar pembudidaya ikan mengalami peningkatan mutu usaha budidaya yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan. Selain itu, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara juga menyediakan benih ikan air tawar dan Air Payau yang diberikan kepada kelompok pembudidaya ikan serta sarana dan prasarana usaha pembenihan ikan agar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp.1.922.649.620,- dan terealisasi Rp. 1.814.645.238,- atau sekitar 94,38 % yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus



(DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan. Hasil dari kegiatan ini adalah 9 Paket bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Budidaya Ikan (Tawar dan Payau) yang diberikan kepada 9 (Sembilan) kelompok pembudidaya ikan, artinya target kinerja kegiatan tercapai 100%.

Selain Faktor dukungan kegiatan dan anggaran terdapat beberapa Faktor pemicu/pendorong keberhasilan peningkatan Volume produksi perikanan di Kabupaten Batu Bara adalah :

1. Berkembangnya budidaya Air Tawar terutama untuk budidaya ikan lele system kolam terpal dengan memanfaatkan lahan pekarangan
2. Mulai berkembangnya usaha budidaya kerang dara / Kerang Batu di Kabupaten Batu Bara
3. Mulai berkembangnya usaha budidaya udang vaname di Kabupaten Batu Bara yang ditandai adanya investor / perusahaan yang melakukan usaha Budidaya Udang Vaname di Kabupaten Batu Bara.
4. Mulai terbukanya perusahaan / pengusaha tambak udang akan data produksi budidaya udang vaname.
5. Berkembangnya usaha budidaya Udang Vaname Sistem terpal dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak terlalu luas.
6. Efek dari stimulus berupa bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan yang telah diberikan oleh Dinas Perikanan Budidaya Batu Bara yang bersumber dari dana APBD Kab. Batu Bara, APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuan utama untuk peningkatan produksi dan pendapatan pembudidaya
7. Kegiatan pelatihan, dan penyuluhan serta pendampingan usaha pada kelompok pembudidaya ikan
8. Permintaan pasar ekspor khususya untuk budidaya udang dan kerapu terus meningkat

b. Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi belum optimalnya peningkatan produksi perikanan budidaya antara lain :

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya baik budidaya air payau, air tawar dan air laut



2. Kurangnya pasokan benur udang vaname yang cukup diakibatkan belum adanya Unit Pembenihan/Hatchery Udang Vaname di Kabupaten Batu Bara sehingga masih mengandalkan pasokan dari Kabupaten lain.
3. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan pembudidaya ikan dalam menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
4. Terjadinya kenaikan harga pakan ikan sehingga menambah biaya produksi
5. Masih kurangnya penerapan teknologi budidaya ikan dan udang yang diterapkan pembudidaya di Kabupaten batu Bara
6. Fluktuasi harga ikan terutama harga ikan lele yang mengakibatkan pembudidaya berhenti usaha dan beralih ke komoditas budidaya yang lain.

c. Efisiensi Anggaran

Nilai Efisiensi pada produksi Perikanan budidaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 22. Efisiensi anggaran terhadap indikator kinerja produksi perikanan budidaya.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3.100	3.120,41	100,65	3.422.649.620,00	3.303.344.233,00	96,51	1,00

Hasil perhitungan nilai efisiensi pada produksi perikanan budidaya menunjukkan nilai 1.0, pada kegiatan program ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik dengan disertai hasil capaian indikator kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

5. Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

Selain potensi perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, Kabupaten Batu Bara memiliki potensi pengembangan usaha di bidang Pengolahan Hasil Perikanan baik pengolahan hasil dari produk perikanan tangkap maupun dari perikanan budidaya, sampai sejauh ini sektor pengolahan belum terkelola secara optimal padahal sektor pengolahan ini kalau dikelola secara optimal akan menjadi sumber ekonomi di wilayah pesisir sebagai sumber ekonomi utama maupun tambahan.

Dari data Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara tahun 2024 jumlah pengolah hasil perikanan di Kabupaten Batu Bara sebanyak 1.788 Orang, jumlah unit pengolahan



ikan sebanyak 5 Unit, jumlah kelompok pengolahan sebanyak 25 Kelompok dengan hasil olahan unggulan berupa : Ikan Teri Nasi, Ikan Teri, Ikan Asin, Pindang Ikan / Kembung Rebus, Kepah Asin, Terasi/Belacan, Abon Ikan, Kerupuk Ikan dll. Adapaun capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara dalam meningkatkan produksi hasil olahan produk perikanan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 23 Capaian Indikator Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

Indikator Kinerja	Produksi Tahun 2023(Ton)	Target 2024 (Ton)	Realisasi 2024 (Ton)	Pencapaian Target (%)
Produksi Pengolahan Hasil Produk Perikanan	1.409,19	1.600	1.797,56	112,35

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Capaian indikator kinerja Produksi Pengolahan Hasil Perikanan telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian target sebesar 112,35 %
- b. Dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, maka capaian Produksi Pengolahan Hasil Perikanan tahun 2024 mengalami pertumbuhan volume produksi yang cukup signifikan yaitu sebesar 388,37 Kg dan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

a. Analisis Faktor Pemicu Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Pencapaian Indikator Persentase peningkatan volume produksi pengolahan hasil perikanan didukung oleh 1 (satu) program yaitu :

a) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui upaya peningkatan kompetensi pengolah dan pemasar ikan, peningkatan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar ikan, serta peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan dengan tujuan utama meningkatkan nilai ekonomis terhadap hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya melalui peningkatan nilai tambah dalam wujud produk olahan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang banyak ditemui dalam usaha, yakni



pemasaran. Pagu anggaran pelaksanaan program di tahun 2024 sebesar Rp. 1.048.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.032.138.600,- (98,49%).

Indikator kinerja Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah persentase produksi perikanan yang diolah Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan. Capaian kinerja Jumlah Produksi Pengolahan Tahun 2024 adalah sebesar 1.797,56 Ton dari target sebesar 1.600 Ton.

Tabel 24. Capaian Indikator Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN 2023	2024			TARGET AKHIR RENSTRA	Capaian 2024 terhadap Akhir Renstra 2026 (%)
			TARGET	REALISASI	% REALISASI		
1	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	1.409,19	1.600,00	1.797,56	112,35	2.300,00	78,15

Sumber : Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam mendukung pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Bentuk dari kegiatan ini antara lain berupa pendampingan usaha dan pendampingan teknis tentang usaha pengolahan hasil perikanan yang bekerjasama dengan *stake holder* terkait anatara lain Dinas Kesehatan dan Keluarga Bencana, Dinas Koperasi dan UKM, selain itu juga dalam kegiatan ini Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2024 melaksanakan Bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) sebanyak 2 (dua) Unit yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan dengan tujuan untuk meningkatkn produksi dan Produktifitas Unit Pengolahan Ikan serta meningkatkan kualitas mutu hasil olahan tersebut. Dalam kegiatan ini pada Tahun 2024 Dinas Perikanan dan Peternakan melaksanakan kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi angka *stunting* Kabupaten Batu Bara, kegiatan gemarikan dilaksanakan di daerah/Desa Lokasi Khusus (Lokus) Stunting yang telah ditetapkan oleh Bupati Batu Bara tahun 2024. Bentuk dari kegiatan gemarikan yang dilaksanakan yaitu membagikan



Ikan Segar, serta olahan dari produk ikan kepada keluarga rentan stunting sebanyak 2.835 orang.

Faktor pemicu keberhasilan pencapaian target indikator peningkatan volume produksi pengolahan hasil perikanan antara lain :

1. Banyaknya permintaan apasar akan produk hasil olahan perikanan terutama untuk produk Ikan Teri Nasi, Ikan Asin, Kepah Kering, Ikan Pindang dll dari pasar local maupun luar daerah ;
2. Mulai berkembangnya pasar digital sehingga meningkatkan permintaan pasar akan produk olahan hasil perikanan.
3. Adanya efek turunan dari melimpahnya hasil tangkapan di Kabupaten Batu Bara yang mengakibatkan rendahnya harga jual ikan segar sehingga ikan-ikan tersebut diolah menjadi ikan kering atau ikan asin
4. Dilakukannya kegiatan pendataan hasil terutama pendataan pada gudang/gudang pengolahan ikan teri nasi/teri medan serta perusahaan Unit Pengolahan Ikan di Kabupaten Batu Bara sehingga dapat mengurangi kehilangan data produksi pengolahan yang tidak tercatat (*unreported*).

b. Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Adapun faktor penghambat dalam peningkatan volume produksi pengolahan hasil produk perikanan antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan
2. Teknologi pengolahan hasil perikanan masih tradisional
3. Diversifikasi Produk olahan hasil perikanan belum beragam
4. Pengemasan produk hasil olahan masih sederhana sehingga belum menarik minat konsumen milenial
5. Masih bayaknya data hasil olahan yang belum terdata terutama di gudang/gudang pengolahan ikan teri nasi/teri medan akibat dipersulitnya akses masuk ke lokasi pengolahan tersebut.
6. Masih belum termanfaatkannya limbah hasil perikanan tangkap seperti ikan rucaah, kulit kepiting/rajungan sebagai produk olahan yang memiliki nilai jual/nilai tambah

c. Efisiensi Anggaran

Nilai Efisiensi pada produksi Pengolahan hasil perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 25. Efisiensi anggaran terhadap indikator kinerja produksi hasil pengolahan ikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan mandiri	Produksi Hasil Pengolahan Ikan	Ton	1.600	1.797,56	112,35	1.048.000.000,00	1.032.138.600,00	98,49	1,11

Hasil perhitungan nilai efisiensi pada produksi hasil pengolahan ikan menunjukkan nilai 1.11. pada kegiatan program ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik dengan disertai hasil capaian indikator kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

6. Peningkatan Produksi Ternak Unggulan

Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan produksi ternak unggulan di Kabupaten Batu Bara adalah dengan menggunakan indikator produksi daging ternak unggulan di Kabupaten Batu Bara antara lain Produksi Daging Sapi, Produksi Daging Kambing, Produksi Daging Domba dan Produksi Telur. Berdasarkan data populasi ternak tahun 2024, diketahui bahwa potensi peternakan di Kabupaten Batu Bara cukup tinggi yaitu 33.982 ekor sapi, Kerbau 855 Ekor yang tersebar di setiap kecamatan dengan populasi tertinggi terdapat di Kecamatan Lima Puluh. Di samping itu populasi ternak ruminansia kecil juga cukup tinggi yakni sekitar 14.301 ekor kambing dan 30.983 ekor domba. Capaian dari Indikator Peningkatan Produksi Ternak unggulan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 26. Capaian Indikator Peningkatan Produksi Ternak Unggulan

Indikator	Realisasi Th 2023 (Ton)	Target 2024 (Ton)	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
Produksi Daging Sapi	306,43	310	271,91	87,71
Produksi Daging Kambing	21,02	30	27,34	91,13
Produksi Daging Domba	47,41	58	53,44	92,14
Produksi Telur	608,90	610	489,29	80,21

Sumber : Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024.

Berdasarkan data di atas, hanya indikator produksi telur yang mengalami penurunan produksi dari tahun 2023, hal ini dikarenakan terdapat 1 unit usaha ayam petelur yang sudah tutup sehingga target indikatornya tidak tercapai.



Indikator peningkatan produksi ternak unggulan ini didukung oleh 3 (tiga) program antara lain :

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan melalui Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja nya adalah :

Tabel 27. Capaian Realisasi Indikator Peningkatan Produksi Ternak Unggulan

Indikator	Realisasi Th 2023 (Ton)	Target 2024 (Ton)	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
Produksi Daging Sapi	306,43	310	271,91	87,71
Produksi Daging Kambing	21,02	30	27,34	91,13
Produksi Daging Domba	47,41	58	53,44	92,14
Produksi Telur	608,90	610	489,29	80,21

Bentuk dari kegiatan ini adalah pemberian bantuan bibit ternak unggulan berupa bibit ternak Domba/Kambing, Bibit Itik, Bibit Ayam Kampung, Bantuan Mesin coper serta pelaksanaan Inseminasi buatan yang mana pada tahun 2024 dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara telah mengadakan pembelian semen beku sebanyak 5.000 Staw/Dosis yang berasal dari Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosasri. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan populasi ternak unggulan Kabupaten Batu Bara serta meningkatkan kualitas induk dan anakan ternak yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan produksi daging ternak unggulan dan produksi telur di Kabupaten Batu Bara. Selain bantuan dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara, pada Tahun 2024 terdapat beberapa bantuan ternak yang berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Bantuan dari Kementerian Pertanian. Data populasi ternak unggulan Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada tabel d bawah ini :



Tabel 28. Populasi Ternak Kabupaten Batu Bara tahun 2024.

NO	KECAMATAN	JENIS TERNAK (Ekor) / PRODUK TERNAK (Kg)																							
		SAPI			KERBAU			KAMBING			DOMBA			BABI			BROILER			AYAM BURAS			ITIK		
		Σ Populasi (ekor)	Σ Dipotong (ekor)	Σ Daging (Kg)	Σ Populasi (ekor)	Σ Dipotong (ekor)	Σ Daging (Kg)	Σ Populasi (ekor)	Σ Dipotong (ekor)	Σ Daging (Kg)	Σ Populasi (ekor)	Σ Dipotong (ekor)	Σ Daging (Kg)	Σ Populasi (ekor)	Σ Dipotong (ekor)	Σ Daging (Kg)	Σ Populasi (ekor)	Σ Dipotong (ekor)	Σ Daging (Kg)	Σ Populasi (ekor)	Σ Dipotong (ekor)	Σ Daging (Kg)	Σ Populasi (ekor)	Σ Dipotong (ekor)	Σ Daging (Kg)
1	Sei Belai	3.255	205	25.830	99	7	1.232	1.238	142	1.704	1.041	320	3.840	144	13	650	-	202.250	242.700	52.593	3.832	4.598	3.986	4	5
2	Tanjung Tiram	200	77	9.702	-	13	2.288	480	78	936	516	81	972	-	-	-	12.000	192.791	231.349	17.259	3.172	3.806	1.353	1	1
3	Nibung Hangus	595	80	10.080	5	11	1.936	1.015	74	888	720	99	1.188	220	16	800	-	173.557	208.268	27.223	2.681	3.217	2.342	1	1
4	Talawi	518	98	12.348	56	15	2.640	504	84	1.008	436	143	1.716	242	2	100	18.000	179.111	214.933	26.136	2.666	3.199	3.809	1	1
5	Datuk Tanah Datar	2.839	295	37.170	26	-	-	1.116	130	1.560	805	320	3.840	128	25	1.250	152.950	267.986	321.583	31.761	3.791	4.549	2.665	4	5
6	Lima Puluh	8.915	248	31.248	122	2	352	1.194	286	3.432	5.326	594	7.128	46	6	300	61.850	239.149	286.979	29.764	3.488	4.186	2.048	4	5
7	Lima Puluh Pesisir	3.190	146	18.396	52	93	16.368	1.062	217	2.604	2.282	395	4.740	83	2	100	204.000	288.919	346.703	34.931	4.731	5.677	4.582	1	1
8	Datuk Lima Puluh	5.527	180	22.680	15	-	-	966	195	2.340	2.479	402	4.824	145	5	250	137.750	166.348	199.618	38.587	3.330	3.996	3.364	1	1
9	Air Putih	534	257	32.382	279	13	2.288	1.356	294	3.528	3.460	634	7.608	516	141	7.050	-	689.201	827.041	25.426	6.503	7.804	13.561	717	860
10	Sei Suka	2.043	170	21.420	24	13	2.288	734	209	2.508	2.566	375	4.500	177	48	2.400	4.750	863.898	1.036.678	21.368	4.126	4.951	978	529	635
11	Laut Tador	5.782	211	26.586	82	-	-	3.853	390	4.680	9.315	732	8.784	293	42	2.100	26.850	158.534	190.241	39.248	2.980	3.576	1.884	2	2
12	Medang Deras	394	191	24.066	95	58	10.208	783	179	2.148	2.037	358	4.296	188	71	3.550	49.800	361.301	433.561	41.606	6.484	7.781	6.700	16.909	20.291
Σ ternak potong / daging		33.792	2.158	271.908	855	225	39.600	14.301	2.278	27.336	30.983	4.453	53.436	2.182	371	18.550	667.950	3.783.045	4.539.654	385.902	47.784	57.341	47.272	18.174	21.809
dalam Ton		271,91 Ton			39,60 Ton			27,34 Ton			53,44 Ton			18,55 Ton			4.539,65 Ton			57,34 Ton			21,81 Ton		

Pada tahun 2024 alokasi anggaran untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 1.490.034.535,- (*satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*) atau 99,34%.

2) Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan tujuan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit menular pada hewan serta mengawasi peredaran hewan dan produk hewan. Indikator dari Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Persentase Kasus Penyakit yang ditangani dengan target penanganan kasus sebesar 92 % dan terealisasi sebesar 85% dari kasus penyakit ternak yang ada di Kabupaten Batu Bara.

Bentuk dari pelaksanaan program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan diseluruh kecamatan dan desa yang ada Di Kabupaten Batu Bara yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Hewan beserta petugas paramedik veteriner yang di tugaskan di setiap kecamatan. Adapun pelayanan kesehatan hewan yang dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain



Vaksinasi PMK pada hewan Sapi, Kerbau, Domba, Kambing dan Babi , Vaksinasi Rabies, Vaksinasi LSD, Pemeriksaan Kebuntingan, Pemeriksaan Kesehatan Hewan, dll. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan dalam program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah pengawasan pemotongan hewan pada saat hari-hari besar keagamaan seperti pada saat sebelum bulan Ramadhan, menjelang bulan Ramadhan dan pada hari raya Idul Adha.

Pada tahun 2024 alokasi anggaran untuk mendukung Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebesar Rp. 495.000.000,- (*empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) dengan realisasi Rp. 491.102.500,- (*empat ratus sembilan puluh satu juta seratus dua ribu lima ratus rupiah*) atau sebesar 98,58%.

3) Program Penyuluhan Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu : Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan Sub Keegiatannya Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota. Sekolah Lapang yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2024 sebanyak 2 kegiatan antara lain :

- a) Sekolah Lapang Pengolahan Pakan Silase merupakan salah satu upaya pembinaan masyarakat/peternak dalam mengumpulkan dan/atau mengolah bahan pakan berbasis sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi dalam memproduksi, mengawetkan dan/atau mendistribusikan pakan untuk ternak ruminansia secara berkelanjutan. Pakan Silase juga dapat digunakan sebagai cadangan pakan ketika musim kemarau. Fungsi dari pengembangan unit pengolahan pakan silase yaitu untuk memberdayakan kelompok yang melakukan usaha pengolahan pakan silase sehingga dapat menyediakan pakan silase untuk memenuhi kebutuhan pakan di kelompok dan/atau di lingkungan sekitarnya.
- b) Sekolah Lapang Budidaya Unggas adalah salah satu upaya pembinaan masyarakat/peternak dalam memelihara ternak unggas khususnya itik dan ayam kampung yang praktis dan efisien dengan memanfaatkan tempat terbatas dan memanfaatkan sumber daya bahan baku pakan lokal yang ada di



daerah. Sehingga diharapkan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat/peternak, mengingat itik dan ayam kampung bisa dimanfaatkan sebagai ternak unggas dwifungsi yakni petelur (betina produktif) dan/atau pedaging (khusus jantan dan betina afkir).

Sasaran Kegiatan Sekolah Lapang yaitu 6 (enam) Kelompok Ternak Ruminansia terpilih berdasarkan hasil verifikasi, dimana masing-masing kelompok ternak membawa 10 orang (terdiri atas anggota kelompok dan/atau peternak mandiri) untuk mengikuti Sekolah Lapang Pengolahan Pakan Silase. 5 (lima) Tim Penggerak (TP) PKK Desa terpilih/yang telah ditetapkan sebagai Desa Percontohan, dimana masing-masing TP-PKK membawa 20 orang (terdiri atas anggota TP-PKK Desa dan/atau warga binaanya) untuk mengikuti Sekolah Lapang Budidaya Unggas. Bentuk kegiatan sekolah lapang yaitu gabungan antara pelatihan teknis dan praktek lapangan.

Tabel 29. Daftar kegiatan dan volume sekolah lapang.

No.	Kegiatan	Volume
1.	Sekolah Lapang Pengolahan Pakan Silase : ✓ Belajar dalam kelas ✓ Kunjungan lapangan ✓ Praktik	1 Paket (60 peserta)
2.	Sekolah Lapang Budidaya Unggas : ✓ Belajar dalam kelas ✓ Kunjungan lapangan ✓ Praktik	1 Paket (100 peserta)

Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan bentuk kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Lapang pada Tahun 2024 di dukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan capaian realisasi anggaran Rp. 970.800.500,- (sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) atau 98,08%.

a. Analisis Faktor Pemicu Pencapaian Kinerja

Faktor pemicu / pendorong pencapaian kinerja peningkatan produksi ternak unggulan antara lain :

1. Adanya kesadaran peternak akan penerapan teknologi Insensinasi Buatan (IB) sehingga angka kelahiran ternak meningkat dibarengi dengan peningkatan genetic hewan ternak



2. Pelaksanaan vaksinasi PMK massive serta pelaksanaan pelayanan Kesehatan hewan secara berkala sehingga kasus PMK di Kabupaten Batu Bara dapat dikendalikan dan bahkan Kabupaten Batu Bara menjadi rujukan dalam penanganan PMK Provinsi Sumatera Utara
3. Faktor alami Kabupaten Batu Bara yang memiliki banyak perkebunan sebagai tempat menggembala ternak serta sebagai sumber hijauan pakan ternak
4. Sudah berkembangnya manajemen pakan ternak

b. Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja

Faktor yang menghambat dalam pencapaian target kinerja peningkatan produksi ternak unggulan Kabupaten Batu Bara pada tahun 2024 adalah adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta wabah Lumpy Skin Disease (LSD) yang menyerang ternak ruminansia khususnya ternak Sapi, Kambing dan Domba. Serangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Batu Bara terdeteksi pada awal bulan Mei dan penyebarannya kasusnya sangat cepat, total ternak yang terserang penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Batu Bara sebanyak 5.646 Ekor. Sampai akhir Bulan Desember 2024 total kasus PMK di Kabupaten Batu Bara adalah 0 (nol) Ekor artinya seluruh ternak yang terserang penyakit PMK telah sembuh 100%.

Dampak negative akibat adanya wabah PMK di Kabupaten Batu Bara adalah ketakutan masyarakat untuk mengkonsumsi daging terutama daging sapi, kambing dan domba, hal tersebut yang mengakibatkan rendahnya produksi daging tahun 2024.

Selain adanya wabah penyakit mulut dan kuku yang melanda ternak di Kabupaten Batu Bara, faktor lain yang menghambat rendahnya produksi ternak unggulan adalah masih rendahnya peternak dalam menerapkan prinsip kesejahteraan hewan.

c. Efisiensi Anggaran

Nilai Efisiensi pada produksi peternakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 30. Efisiensi anggaran terhadap indikator kinerja Produksi hasil peternakan unggulan.



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan Unggulan	Produksi daging sapi	Ton	310	271,91	87,71	1.500.000.000,00	1.490.034.535,00	99,34	0,87
Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan Unggulan	Produksi daging kambing	Ton	30	27,34	91,13	1.500.000.000,00	1.490.034.535,00	99,34	0,90
Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan Unggulan	Produksi daging domba	Ton	58	53,44	92,14	1.500.000.000,00	1.490.034.535,00	99,34	0,91
Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan Unggulan	Produksi telur	Ton	610	489,29	80,21	1.500.000.000,00	1.490.034.535,00	99,34	0,79

Hasil perhitungan nilai efisiensi pada produksi peternakan unggulan menunjukkan nilai masing-masing 0.84, 0.90, 0.91 dan 0.79. pada kegiatan ini, pengelolaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik namun pelaksanaan program kinerja belum berhasil mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan di dokumen perjanjian kinerja.

7. Nilai AKIP OPD

AKIP merupakan nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Adapun hasil capaian dari nilai AKIP Dinas Perikanan Tahun 2024 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 31. Capaian Indikator Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Peternakan

Indikator	Nilai AKIP 2023 (Nilai)	Target 2024(Nilai)	Realisasi (Nilai)	Capaian (%)
Nilai AKIP OPD	BB (70,1)	BB (74,00)	BB (75,1)	101,49

dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi AKIP oleh tim SAKIP Kabupaten Batu Bara, Dinas Perikanan dan Peternakan memperoleh nilai 75,10 dengan kategori BB (sangat baik) dan telah mencapai target.

Faktor pemicu tercapainya target nilai AKIP ini adalah adanya komitmen Kepala Dinas untuk memperbaiki mulai dari identifikasi masalah melalui pohon kinerja,



penetapan indikator, pendelagasian kinerja (cascading), pengalokasian anggaran sesuai dengan target kinerja, melakukan kontrak kerja sampai pada evaluasi capaian kinerja secara berkala. Selain itu juga meningkatnya nilai AKIP Dinas Perikanan dan Peternakan tidak lepas dari Tim AKIP Kabupaten Batu Bara yang terus melakukan pembinaan dan perbaikan sehingga nilai AKIP OPD dan Nilai AKIP Kabupaten mengalami peningkatan.

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian target nilai AKIP OPD adalah masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran ASN tentang pentingnya Akuntabilitas Kinerja yang telah disepakati melalui perjanjian kinerja, faktor lain yang menghambat pencapaian kinerja adalah perjanjian kinerja hanya sampai pada level eselon III (tiga) belum pada level perjanjian kinerja individu.

Dari analisis faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan untuk mencapai tujuan / target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara dapat disimpulkan bahwasannya peluang dalam pengembangan usaha di bidang perikanan masih cukup terbuka lebar apabila dikelola dengan maksimal dengan didukung oleh program/kegiatan yang menjawab tantangan dan permasalahan yang ada dalam upaya peningkatan produksi serta peningkatan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan di Kabupaten Batu Bara serta harus didukung oleh seluruh *Stake Holder* demi untuk mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Batu Bara khususnya Masyarakat yang bermata pencaharian pada sektor perikanan dan peternakan.

Pada tahun 2024 alokasi anggaran untuk mendukung indikator peningkatan Nilai AKIP OPD adalah Program Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp. 7.351.128.388,- (*tujuh milyar tiga ratus lima puluh satu juta serratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*) dengan realisasi anggaran Rp. 7.106.306.897,- (*tujuh milyar serratus enam juta tiga ratus enam ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah*) atau sebesar 94,36%.

Nilai efisiensi anggaran pada indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 32. Efisiensi anggaran terhadap indikator kinerja nilai AKIP.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	74	75,1	101,49	7.531.128.388,00	7.106.306.897,00	94,36	1,01

Hasil nilai efisiensi pada indikator kinerja nilai AKIP adalah sebesar 1.01. pada kegiatan program ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik dengan disertai hasil capaian indikator kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara.

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun Anggaran 2024



No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target			Realisasi			%		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja	Rp.			
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai AKIP Dinas Perikanan dan Peternakan	74	Nilai	7.531.128.388	75,1	Nilai	7.106.306.897	101,49	94,36			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	30.683.378	100	Persen	30.678.900	100,00	99,99			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	20.734.738	4	Dokumen	20.730.900	100,00	99,98			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	9.948.640	2	Dokumen	9.948.000	100,00	99,99			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	6.431.733.378	100	Persen	6.066.882.875	100,00	94,33			
			Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang	6.431.733.378	60	Orang	6.066.882.875	100,00	94,33			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Kegiatan Administrasi Umum	100	Persen	293.547.191	100	Persen	292.632.285	100,00	99,69			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31	Paket	50.280.225	31	Paket	50.048.000	100,00	99,54			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	14.644.618	12	Paket	14.621.500	100,00	99,84			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	29.975.000	12	Paket	29.930.000	100,00	99,85			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	1	Paket	49.387.348	1	Paket	48.837.500	100,00	98,89			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	12	Dokumen	20.400.000	12	Dokumen	20.400.000	100,00	100,00			
			Peyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	Laporan	128.860.000	12	Laporan	128.795.285	100,00	99,95			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Cakupan kegiatan Pengadaan barang	100	Persen	104.250.000	100	Persen	103.725.000	100,00	99,50			
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan yang disediakan	1	Unit	67.200.000	1	Unit	67.200.000	100,00	100,00			
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2	Unit	37.050.000	2	Unit	36.525.000	100,00	98,58			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100	Persen	492.615.741	100	Persen	470.755.288	100,00	95,56			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	8.000.000	1	Laporan	8.000.000	100,00	100,00			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	Laporan	146.695.741	12	Laporan	129.185.288	100,00	88,06			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	337.920.000	12	Laporan	333.570.000	100,00	98,71			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persen	178.298.700	100	Persen	141.632.549	100,00	79,44			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	147.500.000	28	Unit	110.847.549	100,00	75,15			
			Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	30.798.700	15	Unit	30.785.000	100,00	99,96			



			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	60.760	Ton	5.248.632.000	51.870,10	Ton	5.138.537.819	85,37	97,90			
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah	100	Persen	5.083.632.000	100	Persen	4.973.562.819	100,00	97,83			
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	1200	Orang	5.083.632.000	1391	Orang	4.973.562.819	115,92	97,83			
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Cakupan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	100	Persen	165.000.000	100	Persen	164.975.000	100,00	99,98			
			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Layanan	165.000.000	1	Layanan	164.975.000	100,00	99,98			
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	3.100	Ton	3.422.649.620	3.120,41	Ton	3.303.344.233	100,66	96,51			
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Cakupan Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	100	Persen	1.500.000.000	100	Persen	1.488.698.950	100,00	99,25			
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidayaan Ikan Kecil yang mengikuti Pengembangan Kapasitas	20	Kelompok	1.300.000.000	20	Kelompok	1.288.698.950	100,00	99,13			
			Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang memperoleh Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10	Kelompok	200.000.000	10	Kelompok	200.000.000	100,00	100,00			
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Cakupan Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100	Persen	1.922.649.620	100	Persen	1.814.645.283	100,00	94,38			
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	9	Unit	1.922.649.620	9	Unit	1.814.645.283	100,00	94,38			
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Hasil Produk Perikanan	1.600	Ton	1.048.000.000	1.797,56	Ton	1.032.138.600	112,35	98,49			
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	1.048.000.000	100	Persen	1.032.138.600	100,00	98,49			
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	900	Orang	1.048.000.000	900	Orang	1.032.138.600	100,00	98,49			



2	Urusan Pemerintah Bidang Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Ternak Unggulan Kabupaten			1.500.000.000			1.490.034.535		99,34			
				Daging Sapi	300	Ton		271,91	Ton		90,64				
				Daging Kambing	30	Ton		27,34	Ton		91,13				
				Daging Domba	58	Ton		53,44	Ton		92,14				
				Telur Ayam	610	Ton		489,29	Ton		80,21				
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Cakupan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100	Persen	1.500.000.000	100	Persen	1.490.034.535	100,00	99,34			
			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	120 Domba 2.250 Itik 900 Ayam	Ekor	1.500.000.000	120 Domba 2.250 Itik 900 Ayam	Ekor	1.490.034.535	100,00	99,34			
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kasus Penyakit yang ditangani	92	Persen	495.000.000	85	Persen	491.102.500	92,39	99,21			
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	275.000.000	100	Persen	271.102.500	100,00	98,58			
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan	275.000.000	12	Laporan	271.102.500	100,00	98,58			
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner	100	Persen	220.000.000	100	Persen	220.000.000	100,00	100,00			
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2	Laporan	220.000.000	2	Laporan	220.000.000	100,00	100,00			
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Peternakan yang menerapkan Sapta Usaha Peternakan	47	Persen	1.000.000.000	38	Persen	970.800.500	80,85	97,08			
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Cakupan Kegiatan Penyuluhan Pertanian	100	Persen	1.000.000.000	100	Persen	970.800.500	100,00	97,08			
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tigtat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Ternak yang terbentuk dan beroperasi	2	Unit	1.000.000.000	2	Unit	970.800.500	100,00	97,08			
			Jumlah Total				20.245.410.008			19.532.265.084		96,48			



Jumlah anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara pada Tahun 2024 sebesar **Rp. 20.245.410.008,-** dengan realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar **Rp. 19.532.265.084,-**. Dengan demikian dapat dilihat rata-rata pencapaian realisasi anggaran sebesar **96,48 %** dengan nilai realisasi serapan anggaran **Sangat Tinggi**. Sebagai perbandingan, realisasi anggran pada tahun 2024 dengan realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabe di bawah ini :

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 dan Tahun 2024

TA. 2023			TA. 2024		
Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase
10.628.244.753,-	10.293.031.651,-	96,85	20.245.410.008,-	19.532.265.084,-	96,48

Faktor pendorong keberhasilan realisasi anggaran pada tahun 2024 adalah kerjasama antara semua bidang Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara dalam merealisasikan program / kegiatan serta rendahnya pengembalian (*Silva*) yang bias disimpulkan bahwasannya terjadi kesesuaian antara rencana program/kegiatan dengan realisasi program/kegiatan pada tahun 2024.

Faktor yang menghambat dalam realisasi anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2024 adalah lambatnya penyerapan anggaran sehingga penyerapan anggaran yang besar terjadi pada triwulan III dan IV. Dengan demikian diharapkan untuk tahun selanjutnya kendala-kendala seperti tersebut diatas tidak terjadi lagi sehingga realisasi anggaran dapat sesuai dengan rencana realisasi yang telah ditetapkan dan realisasi anggaran akhir tahun dapat lebih tinggi atau sama dengan tahun ini.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah membawa berbagai hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Berbagai perubahan tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tantangan tahun-tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan daerah agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang masih ada dan percepatan pembangunan dengan memanfaatkan dan pengembangan teknologi informasi yang terus berkembang semakin maju dan modern serta meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, kompetensi dan mampu bersaing menghadapi era digitalisasi dan informasi.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara, Laporan Kinerja (LK) Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang terhadap segala sesuatu yang telah dilaksanakan untuk kepentingan Negara dan Daerah. Karenanya Laporan Kinerja tahun 2024 ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diemban, sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi. Disadari bahwa pembuatan Laporan Kinerja tahun 2023 ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan adanya sikap adaptif dan responsif dalam pemberian kritik dan saran perbaikan.

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2024 di atas tentunya tidak terlepas dari kendala/permasalahan. Meski telah diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi, selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja periode selanjutnya. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.